

WARTA PEMERIKSA

EDISI 11 ■ VOL. V ■ NOVEMBER 2022



G20 INDONESIA
2022



SAI20
INDONESIA
2022 INDONESIA AUDIT INSTITUTION



MEWUJUDKAN PEMERATAAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN



9

BPK Koreksi Penghitungan
Subsidi Listrik PLN

18

BPK Optimistis G20 akan
Percepat Pemulihan Ekonomi

26

BPK Jadi Ketua Panel
Pemeriksa Eksternal PBB



Energi menjadi laporan utama yang diangkat redaksi dalam *Warta Pemeriksa* edisi November 2022. Energi merupakan masalah yang sangat penting saat ini. Di tengah ancaman krisis energi dan perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai, pembahasan isu ini terus dilakukan. Bahkan, energi juga menjadi salah satu isu utama yang dibicarakan di gelaran Presidensi G20 Indonesia di Bali, belum lama ini.

Energi juga menjadi salah satu objek pemeriksaan penting yang dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait dengan subsidi. Pemberian subsidi energi merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Kemudian membantu masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam rubrik Sorotan, redaksi melaporkan bahwa BPK akan mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan beban kompensasi dengan subsidi tersebut sehingga tercipta keadilan sosial. Sudah seharusnya komposisi beban kompensasi tidak lebih besar dibandingkan dengan beban subsidi.

Tidak tertutup kemungkinan, kompensasi listrik kepada golongan mampu dihapus sehingga akan mengurangi beban pemerintah dan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan lain. Selain itu, dalam pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya unsur pendapatan dan beban yang belum diperhitungkan dan salah pembebanan yang mengakibatkan adanya kelebihan perhitungan subsidi dan kompensasi listrik.

Dalam BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan laporan mengenai pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik tahun 2021 terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PLN menghitung nilai subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp58,88 triliun (*unaudited*).

Informasi menarik lainnya adalah bagaimana pentingnya adaptasi dan inovasi dalam sebuah organisasi, terutama BPK. Simak bagaimana Biro Umum BPK menerapkan konsep *sharing* sebagai implementasi dari konsep adaptasi dan inovasi. Ini merupakan konsep ini yang memungkinkan siapapun yang masuk hari itu untuk menempati meja mana saja yang kosong. Jadi, tidak ada meja yang *dedicated* alias menjadi 'hak milik'.

Di rubrik Internasional, redaksi menyiapkan laporan mengenai prestasi baru BPK di tingkat internasional. Kali ini, BPK terpilih sebagai ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency) periode Desember 2022-Desember 2023.

Masih banyak informasi penting dan menarik lain yang redaksi siapakan dalam *Warta Pemeriksa* edisi November 2022. Silakan menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

R. Yudi Ramdan Budiman

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Bestantia Indraswati

Sekretariat

Bambang Supriedi
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S.
Apriyana
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)



4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN

Peralihan ke energi hijau tetap harus memperhatikan kepentingan ketahanan energi nasional.

- 9 BPK KOREKSI PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK PLN
- 11 BPK UNGKAP KELEBIHAN PENERIMAAN PERTAMINA ATAS HARGA JUAL BBM PREMIUM
- 14 MENGULAS PEMERIKSAAN SUBSIDI PUPUK



18 BPK OPTIMISTIS G20 AKAN PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI

Komunike mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam komunitas G20.

- 20 MUHAMMAD RIZAL ASSIDDIQIE, KEPALA BIRO UMUM 'BERADAPTASI UNTUK MEMBANGUN ORGANISASI'
- 25 BPK HADIRI INCOSAI BRASIL 2022
- 26 BPK JADI KETUA PANEL PEMERIKSA EKSTERNAL PBB
- 28 MENGAWAL PENGUATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
- 31 GERAKAN MENGAJAR UNTUK MENGINSPIRASI
- 34 JAGA DATA DIGITAL DENGAN *SECURITY AWARENESS* DAN *ZERO TRUST SECURITY*
- 39 WAKIL KETUA MINTA BADIKLAT SELARAS DENGAN DNA BPK
- 40 ANGGOTA III BPK SAMPAIKAN KULIAH UMUM DI UPN "VETERAN" JAKARTA
- 43 SPIRITUALITAS STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA
- 48 BERITA FOTO

MEWUJUDKAN PEMERATAAN ENERGI YANG BERKELANJUTAN

Peralihan ke energi hijau tetap harus memperhatikan kepentingan ketahanan energi nasional.



■ Hendra Susanto

Pemberian subsidi energi merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto menyampaikan, pengelolaan anggaran dan belanja subsidi dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Subsidi energi diberikan melalui subsidi listrik dan kompensasi

listrik melalui PLN dan subsidi BBM serta LPG melalui Pertamina.

Pemberian subsidi listrik timbul karena perbedaan antara harga jual listrik yang ditetapkan pemerintah dengan biaya yang dikeluarkan PLN untuk memproduksi tenaga listrik yang dikenal Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL). Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait mekanisme pembayaran subsidi listrik. Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menetapkan biaya-biaya yang bisa dikelompokkan dalam komponen BPP TL dan biaya-biaya yang tidak bisa dimasukkan dalam komponen tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut, sebetulnya kendali pemerintah atas efisiensi sudah berjalan,” ujar Hendra kepada *Warta Pemeriksa*.



Dalam pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya unsur pendapatan dan beban yang belum diperhitungkan, salah pembebanan yang mengakibatkan adanya kelebihan perhitungan subsidi dan kompensasi listrik.

Akan tetapi, ujarnya, terdapat mekanisme kompensasi listrik dari pemerintah yang timbul atas golongan tarif nonsubsidi atau golongan mampu. Tarif listrik seharusnya mengikuti mekanisme pasar sesuai formula yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

“Namun, karena kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik pada golongan nonsubsidi (mampu) ini, maka pemerintah memberikan kompensasi,” ujarnya.

Ke depannya BPK akan mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan beban kompensasi dengan subsidi tersebut sehingga tercipta keadilan sosial. Hendra menekankan, sudah seharusnya komposisi beban kompensasi tidak lebih besar dibandingkan dengan beban subsidi. Tidak tertutup kemungkinan, ungkap Hendra, kompensasi listrik kepada golongan mampu ini dihapus sehingga akan mengurangi beban pemerintah dan dananya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan lain.

“Selain itu, dalam pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya unsur pendapatan dan beban yang belum diperhitungkan, salah pembebanan yang mengakibatkan adanya kelebihan perhitungan subsidi dan kompensasi listrik,” ungkap Hendra.

Serupa dengan pemberian subsidi listrik, pemberian subsidi BBM diberikan karena ada perbedaan antara harga jual BBM dan LPG tabung 3 kg yang ditetapkan pemerintah dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Reviu BPK atas lingkungan pengendalian dalam kegiatan penjualan dan pendistribusian BBM dan LPG tabung 3 kg, serta perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG tabung 3 Kg tahun 2021, menunjukkan adanya kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Hal itu antara lain koordinasi yang kurang opti-

mal oleh fungsi yang ada dalam struktur organisasi Pertamina setelah terbentuknya *holding* dan *subholding* serta pelaksanaan digitalisasi SPBU yang belum optimal. Kemudian, tidak tertibnya pencatatan aktivitas dan pemakaian JBT minyak solar kapal sehingga penyalurannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemudian, tidak tertibnya pencatatan penyaluran LPG tabung 3 kg sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hendra.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan terkait subsidi listrik yang mengungkapkan permasalahan antara lain susut trafo pembangkit belum didefinisikan dan ditetapkan dalam regulasi. Susut trafo pembangkit dapat terjadi ketika terdapat selisih antara energi yang diterima dan disalurkan dalam peralatan trafo di suatu pembangkit yang sampai dengan periode pemeriksaan tahun 2021 dicatat dalam pemakaian sendiri sentral adalah sebesar 986 juta kWh. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan BPP TL tahun 2021 sebesar Rp1,21 triliun dan penurunan nilai subsidi listrik tahun 2021 sebesar Rp309,87 miliar.

Hasil pemeriksaan juga menyatakan, PLN kurang cermat dalam melakukan pengelompokan pembangkit yang meliputi pembangkit milik sendiri, pembangkit sewa, pembangkit proyek, dan pembangkit *independent power producer* (IPP) yang komponen bahan bakarnya ditanggung oleh PLN. Kemudian, terjadi kurang catat jumlah produksi sebanyak 527 ribu MWh dan lebih catat pemakaian bahan bakar gas sebanyak 6.347 BBTU pada PLTG MCTN.

“Hal ini mengakibatkan perhitungan *specific fuel consumption* (SFC) dan efisiensi biaya bahan bakar pembangkit PLN berpotensi tidak akurat sebagai salah satu dasar perhitungan BPP tenaga listrik dan subsidi listrik,” ujarnya.

Terkait subsidi BBM, penyaluran JBT Minyak Solar Pertamina juga tidak sesuai peruntukan sebanyak 3,77 juta liter dengan nilai subsidi sebesar Rp1,89 miliar.

Pertamina juga belum memperhitungkan hasil verifikasi BPH Migas pada kuartal IV 2021 dan hasil reviu BPKP atas dana kompensasi 2021 berupa koreksi kurang penyaluran JBT Minyak Solar sebesar 16,96 juta liter dengan nilai subsidi sebesar Rp8,48 miliar.



BPK juga mengingatkan terdapat sejumlah temuan berulang terkait penyaluran subsidi energi. Hal itu antara lain realisasi penggunaan BBM pada pengoperasian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) PLN melebihi batas SFC standar operasi PLN. Sehingga, PLN mengalami ketidakhematan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan berpotensi kehilangan kesempatan menerima denda pelampauan SFC pembangkit sewa/IPP.

BPK merekomendasikan kepada direksi PLN antara lain agar melakukan kajian strategis atas batasan SFC PLTD atas penggunaan bahan bakar biofuel dengan pertimbangan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, NPHR, teknologi pembangkit, serta merevisi Standar PLN Nomor 79 Tahun 1987 berdasarkan hasil kajian strategis tersebut.

PLN juga kurang cermat dalam melakukan pengelompokan pembangkit, pencatatan volume produksi, dan pemakaian bahan bakar dalam menerapkan formula SFC sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan kepada direksi PLN antara lain agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait hal-hal yang belum jelas dalam formula perhitungan SFC, terutama pengaturan pembangkit *start-up* selain PLTU untuk meningkatkan akurasi perhitungannya.

BPK juga menemukan, penyaluran LPG tabung 3 Kg kepada usaha nonmikro tidak tepat sasaran. BPK merekomendasikan kepada direksi Pertamina antara lain agar meningkatkan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkala atas penjualan melalui *outlet* penyalur dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perikatan atas terjadinya penyelewengan. Selain itu, *losses* operasi JBT Minyak Solar pada lembaga penyalur Pertamina melebihi toleransi. BPK merekomendasikan kepada direksi Pertamina antara lain agar meningkatkan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkala atas penyaluran oleh SPBU dan SPBUN.

Ketahanan energi

Komitmen negara-negara G20 untuk memperkuat penggunaan energi hijau dinilai perlu dibarengi dengan menjaga kepentingan ketahanan energi nasional. Kebijakan energi nasional telah memberi arah pengelolaan energi nasional. Hal ini guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan serta untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Hendra mengatakan, banyak contoh keberhasilan negara-negara lain dalam pengelolaan dan transisi energi hijau. Hal ini membuat sebuah negara dapat bertahan terhadap gejolak harga minyak dunia termasuk tekanan politik oleh negara yang lebih maju.

Dia mencontohkan, Brasil yang memiliki sumber migas lebih besar dari Indonesia tidak terlalu tergantung pada energi fosil. Negara tersebut sejak 1980-an secara serius dan konsisten mengembangkan *biofuel*. Jepang, juga contoh negara yang tak mau tergantung pada energi fosil. Negara Matahari Terbit itu



Banyak contoh keberhasilan negara-negara lain dalam pengelolaan dan transisi energi hijau. Hal ini membuat sebuah negara dapat bertahan terhadap gejolak harga minyak dunia termasuk tekanan politik oleh negara yang lebih maju.



mengembangkan teknologi PLTN sejak 1966. Pada 2011, sekitar 40 persen listrik di Jepang berasal dari tenaga nuklir.

“Kondisi di atas yang seharusnya diikuti oleh Pemerintah Indonesia dengan memprioritaskan pengembangan potensi energi yang berasal dari lokal seperti panas bumi, gas alam, *biofuel*, tenaga air, dan nuklir,” ujarnya.

Meski demikian, Hendra menekankan, peralihan ke energi hijau tetap harus memperhatikan kepentingan ketahanan energi nasional. Dia mencontohkan, saat ini ketika terjadi kekurangan pasokan energi di dunia, beberapa negara di Eropa kembali menggunakan energi fosil untuk pembangkit listriknya.

“Oleh karena itu, Indonesia pun tetap harus waspada jangan sampai cepat beralih ke energi hijau yang lebih mahal dan melupakan energi fosil,” kata Hendra.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan terkait pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Beberapa permasalahan terkait program EBT pada PT PLN (Persero) antara lain PLN tidak memiliki rencana pencapaian bauran EBT yang rinci dan aplikatif. Pengadaan tenaga listrik EBT juga belum memperhatikan harga keekonomian. Selain itu, PLN belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembangkit EBT.

Untuk Pertamina, beberapa permasalahan dalam kegiatan eksploitasi energi panas bumi untuk mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT antara lain yaitu kebijakan perencanaan kegiatan eksploitasi belum sepenuhnya mendukung kebijakan energi nasional penggunaan EBT. Perencanaan pemboran juga belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.

Hendra menilai, akses energi bersih yang terjangkau, pendanaan, dan dukungan riset dan teknologi menjadi tantangan besar dalam upaya transisi energi. Menurutnya, perlu ada peningkatan kesiapan SDM yang kompeten di

bidang energi untuk melaksanakan proses transisi tersebut.

“Pemerintah sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan EBT agar dapat segera direalisasikan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Transisi energi juga menjadi salah satu isu dalam komunique SAI20. Hendra mengatakan, *supreme audit institution* (SAI) merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global termasuk transisi energi yang adil dan terjangkau. Peta jalan atas agenda transisi energi yang telah disusun memerlukan peran BPK dalam memastikan terselenggaranya program *net zero emission* (NZE) secara konsisten yang akuntabel dan transparan serta memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret.

“Ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan,” ujarnya.

BPK melalui AKN VII juga telah melakukan pemeriksaan terhadap agenda transisi energi di antaranya pada pemeriksaan atas kegiatan penyediaan tenaga listrik pada PLN dua tahun terakhir. Pemeriksaan itu di antaranya mencakup pembangkitan EBT.

BPK juga telah menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional diantaranya “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” atau Prioritas Nasional Nomor 6.

“Selanjutnya, sesuai prognosis pemeriksaan tahun 2024, akan dilaksanakan pemeriksaan tematik tersebut,” kata Hendra. ●

BPK RI memperoleh penghargaan sebagai
Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 kategori lembaga negara.
Penghargaan diberikan pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH
dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Nasional Terbaik Tahun 2022
di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM.



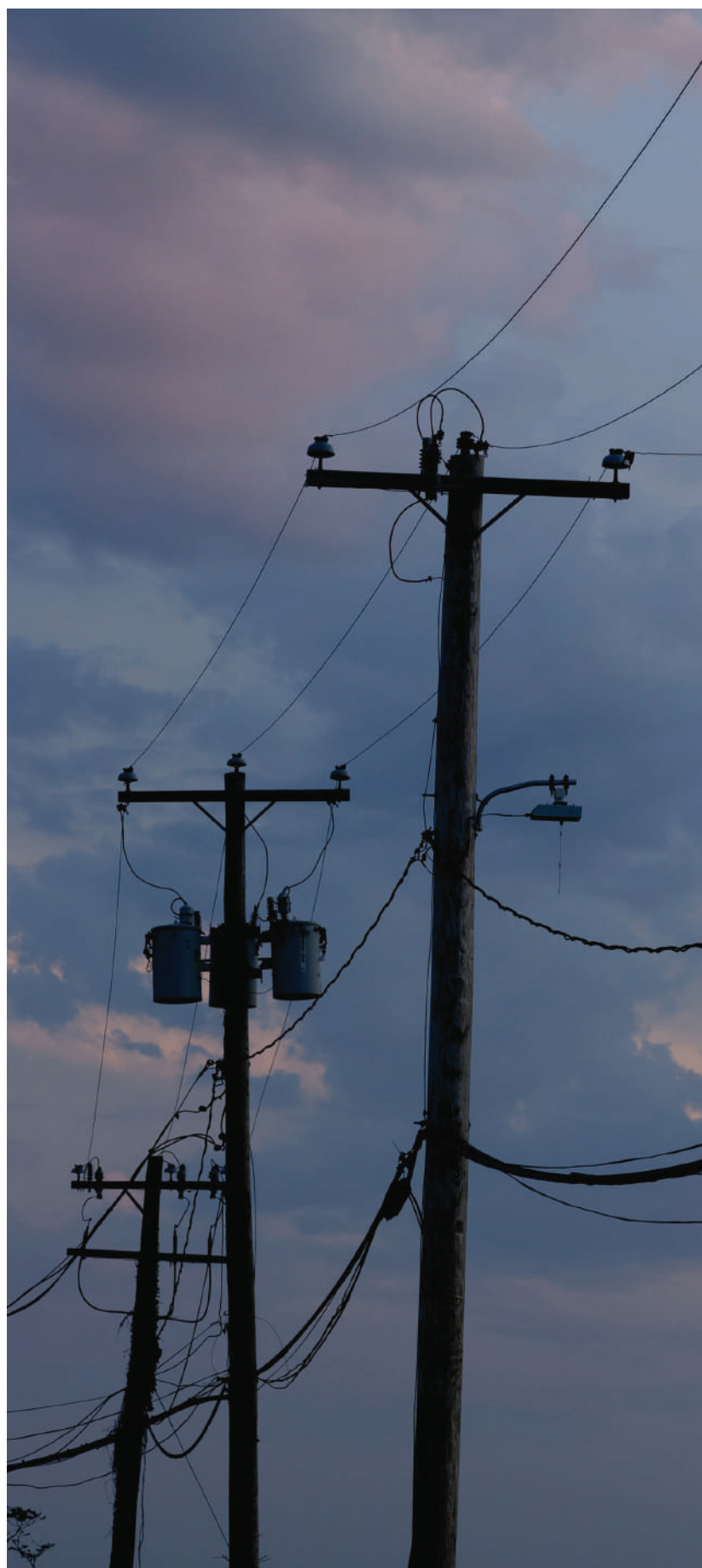
BPK KOREKSI PENGHITUNGAN SUBSIDI LISTRIK PLN

BPK juga menemukan PLN belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembangkit EBT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik tahun 2021 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa PLN menghitung nilai subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp58,88 triliun (*unaudited*). Kemudian, BPK telah melakukan koreksi kurang atas perhitungan PLN sebesar Rp1,0 triliun dan PLN telah menerima koreksi tersebut.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirampungkan pada Juni 2022, nilai subsidi listrik TA 2021 menjadi sebesar Rp57,88 triliun (*audited*) yang terdiri dari subsidi murni sebesar Rp49,8 triliun dan diskon tarif sebesar Rp8,08 triliun. Perhitungan tersebut telah dituangkan dan ditandatangani bersama oleh BPK dan PLN dalam Berita Acara Pemeriksaan Subsidi Listrik TA 2021 pada 12 Mei 2022.

Selain itu, dalam laporan tersebut, BPK juga menyajikan sejumlah temuan pemeriksaan ketidakpatuhan PLN dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.



adrian hernandez-unsplash



PT PLN kurang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dalam proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke gardu induk.

Salah satu permasalahan tersebut antara lain PT PLN kurang berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dalam proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke gardu induk. Selain itu, PT PLN belum proaktif melakukan kajian dan merumuskan prosedur pengendalian atas susut trafo pembangkit.

Hal ini mengakibatkan nilai susut trafo sebesar 986.238.161 kWh tidak terukur dalam pengambilan keputusan pengendalian biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait pengaturan dan penetapan susut trafo pembangkit dan memerintahkan Kepala Satuan Pusat Keunggulan melakukan kajian dan merumuskan prosedur pengendalian atas susut trafo pembangkit dalam upaya efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, BPK juga menemukan PLN belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). PLN merencanakan program pengembangan pembangkit EBT sebesar 20,9 GW dalam RUPTL PLN tahun 2021-2030. Hal itu guna mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen tahun 2025 sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa PLN tidak optimal dalam merencanakan dan memantau kemajuan pengembangan pembangkit EBT. PLN juga belum membuat keputusan lebih lanjut atas 38 perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBT) EBT berkapasitas 806,54 MW yang belum mendapatkan pembiayaan.

Hal tersebut mengakibatkan PLN belum secara optimal dapat mendukung pencapaian bauran EBT secara nasional dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya dan keandalan sistem kelistrikan PLN. Hal tersebut disebabkan oleh direksi PLN belum memiliki *database* pengembangan pembangkit EBT yang terintegrasi dan informatif. PLN juga belum melakukan penilaian risiko untuk setiap pembangkit EBT yang direncanakan sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian dan mitigasi risiko pengembangan masing-masing pembangkit EBT.

Atas permasalahan tersebut, direksi PLN menanggapi bahwa dalam rangka penyusunan RUPTL 2021–2030, PLN secara umum menyusun kajian *generation expansion planning* berupa identifikasi potensi sumber energi yang tersedia dan dampak, risiko, keuntungan dan manfaatnya terhadap sistem kelistrikan. Selain itu, penyusunan kajian kelayakan dilakukan secara bertahap untuk pembangkit yang akan segera dimulai implementasi proyeknya, dengan prioritas penyusunan kajian untuk pembangkit yang akan beroperasi dalam lima tahun pertama.

PLN menyebut, pengembangan pembangkit EBT sebesar 140 MW memang terkendala dan saat ini masih diupayakan pembangunannya untuk terus dilanjutkan dengan pihak-pihak terkait. PLN sedang berkoordinasi secara intensif dengan pihak pengembang untuk mengatasi permasalahan yang ada dan secara internal menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko lebih lanjut. PLN terus berupaya untuk mengejar keterlambatan *commercial operations date* (COD) pembangkit EBT.

BPK merekomendasikan direksi PLN agar menyusun *database* pengembangan pembangkit EBT yang terintegrasi dan informatif. BPK juga merekomendasikan direksi PLN agar melakukan penilaian risiko untuk setiap pembangkit EBT yang direncanakan sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian dan mitigasi risiko pengembangan masing-masing pembangkit EBT. ●

BPK UNGKAP KELEBIHAN PENERIMAAN PERTAMINA ATAS HARGA JUAL BBM PREMIUM

PT Pertamina mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp5,87 triliun.



engin akyurt-unsplash

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas kegiatan perhitungan kelebihan (kekurangan) penerimaan PT Pertamina dan PT AKR atas penetapan harga jual eceran (HJE) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) Solar/Biosolar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2020 pada semester I 2022. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan perhitungan kelebihan

(kekurangan) penerimaan atas penetapan HJE JBT Solar/Biosolar dan JBKP tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas penetapan HJE JBT dan JBKP mengungkapkan tiga temuan yang memuat tiga permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi satu kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 299,83 miliar dan dua ketidakpatuhan sebesar Rp5,88 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan HJE JBT Solar dan JBKP. HJE ini berbeda dengan HJE menurut perhitungan formula harga dasar JBT dan JBKP. Hal ini mengakibatkan badan usaha mengalami kelebihan atau kekurangan penerimaan atas selisih antara HJE JBT Minyak Solar dan JBKP berdasarkan penetapan pemerintah dengan HJE berdasarkan perhitungan formula.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas selisih kelebihan (kekurangan) penerimaan badan usaha tersebut, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dana Kompensasi BBM adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan akibat selisih antara HJE JBT dan/atau JBPKP yang ditetapkan pemerintah dengan HJE berdasarkan perhitungan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, jika terjadi kelebihan penerimaan maka kebijakan penyelesaiannya dapat berupa pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dapat berupa penyetoran kelebihan penerimaan dari harga dasar oleh badan usaha ke kas negara.

Badan usaha sebagai penyalur BBM adalah PT Pertamina dan PT AKR, sedangkan BBM yang diperhitungkan kompensasinya meliputi JBT yaitu BBM yang mendapatkan subsidi, dan JBKP tanpa subsidi yaitu BBM minimum RON 88 yang didistribusikan di wilayah penugasan.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022, permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya terkait kebijakan harga jual JBKP. BPK mengungkapkan, PT Pertamina mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp5,87 triliun atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran JBKP tahun 2020. Hal itu terdiri dari kelebihan penerimaan atas pen-distribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan

Bali (Jamali) dan non-Jamali masing-masing sebesar Rp1,65 triliun dan Rp4,22 triliun.

Permasalahan tersebut disebabkan direksi Pertamina kurang proaktif dan optimal dalam melakukan koordinasi dengan Menteri ESDM terkait penetapan harga jual eceran JBKP yang berbeda dengan perhitungan formula. Selain itu, direksi Pertamina juga kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait penetapan kebijakan pengaturan kelebihan penerimaan atas kegiatan penyaluran JBKP Premium tahun 2020 dalam surat Menteri Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (8) dan ayat (10), PT

Pertamina (Persero) telah melakukan perhitungan selisih HJE JBKP Premium akibat perbedaan penetapan Harga Jual Eceran dengan Harga Formula di tahun 2020.

BPK merekomendasikan direksi PT Pertamina agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan

Menteri BUMN untuk menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan penerimaan PT Pertamina atas kegiatan penyaluran JBKP Premium tahun 2020 dalam surat Menteri Keuangan.

Terkait kebijakan harga jual JBT, BPK menemukan, PT Pertamina mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp299,83 miliar dan PT AKR mengalami kelebihan penerimaan sebesar Rp15,90 miliar atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran JBT Minyak Solar tahun 2020.

BPK merekomendasikan direksi PT Pertamina dan direksi PT AKR agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN untuk menetapkan kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan PT Pertamina dan kelebihan penerimaan PT AKR, kemudian memperhitungkan koreksi BPK atas kegiatan penyaluran JBT Minyak Solar tahun 2020 dalam surat Menteri Keuangan. ●



Jika terjadi kelebihan penerimaan maka kebijakan penyelesaiannya dapat berupa pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya.

Majalah *Warta Pemeriksa* berhasil mendapatkan **Terbaik II** untuk kategori Penerbitan Media Internal (*Inhouse Magazine*) Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Penghargaan diberikan pada **Malam Anugerah Media Humas 2022** yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 24 November 2022.



MENGULAS PEMERIKSAAN SUBSIDI PUPUK

Fokus perhatian AKN VII adalah volume dan biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai pengecer.

Subsidi pupuk merupakan salah satu faktor penting untuk memajukan pertanian di Tanah Air. Dengan program ini diharapkan dapat membantu petani/keompok tani untuk mendapatkan pupuk yang terjangkau sebagai salah satu sarana utama dalam meningkatkan produksi pertanian. Dengan begitu pada akhir dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Kebijakan subsidi pupuk merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu petani, di mana pupuk merupakan salah satu komponen usaha tani. Dengan subsidi pupuk, petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan,” ujar Tortama Keuangan Negara (KN) VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Novy GA Pelenkahu kepada *Warta Pemeriksa*.

Dia menjelaskan, jenis pupuk subsidi mencakup urea, NPK, SP36, ZA, dan organik. Akan tetapi, sejak 8 Juli 2022, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa hanya ada dua jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk urea dan NPK.

Nilai Subsidi Pupuk

Berdasarkan PMK No 68/PMK.02/2016, besaran subsidi pupuk merupakan selisih antara harga pokok penjualan (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET). Dengan demikian, besaran subsidi pupuk dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- Harga pokok penjualan (HPP)
- Harga eceran tertinggi (HET)
- Realisasi volume penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani.

Secara singkat, nilai subsidi pupuk yaitu $(HPP - HET) \times \text{volume penyaluran pupuk}$. ●

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, BPK pun melakukan pemeriksaan terhadap subsidi pupuk. Menurut Novy, pemeriksaan subsidi pupuk dilaksanakan untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN BA 999).

Fokus pemeriksaan AKN VII adalah kewajaran perhitungan HPP pupuk bersubsidi. Ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap seluruh komponen biaya dengan kriteria Permentan No 28 tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Sektor Pertanian.

Tim pemeriksaan, kata dia, melakukan verifikasi biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dibebankan ke subsidi (*allowable and nonallowable cost*). Selain itu, AKN VII juga melakukan pemeriksaan penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari gudang produsen sampai dengan kios pupuk. “Sedangkan untuk pemeriksaan volume penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/keompok tani dilakukan oleh AKN IV,” ungkap Novy.

Entitas yang Diperiksa BPK Terkait Subsidi Pupuk

- **AKN VII:** PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PT PI beserta 5 anak perusahaan produsen pupuk, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kalimantan Timur. Selain itu, pihak terkait lainnya juga diperiksa, yaitu distributor dan kios pupuk.
- **AKN IV:** Kementerian Pertanian selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) pengelolaan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan petani/keompok tani.



■ Novy GA Pelenkahu

Novy pun menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi perhatian BPK saat melakukan pemeriksaan. Pertama, kewajaran perhitungan HPP pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan No 28/2020. Kedua, kegiatan pengadaan dan volume penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Menurutnya, pengadaan merupakan kegiatan penyediaan pupuk bersubsidi oleh PT PI (Persero) yang ditugaskan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian PT PI (Persero) menugaskan anak perusahaan produsen pupuk untuk mengadakan pupuk bersubsidi, baik dengan produksi sendiri maupun impor.

Sedangkan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan proses distribusi pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani/kelompok tani dengan melibatkan distributor dan kios/pengecer. Produsen, distributor, dan kios/pengecer harus bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

“Yang menjadi fokus perhatian AKN VII adalah volume dan biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dan penyaluran pupuk ber-

subsidi dari lini I (produsen) sampai dengan lini VI (kios/pengecer),” ujar dia.

Perhatian BPK yang ketiga adalah besaran nilai subsidi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah kepada produsen pupuk.

Kendala dan Tantangan

- Permentan No 28 tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Sektor Pertanian tidak mengatur secara tegas terkait biaya atas kegiatan apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan kepada subsidi. Atas permasalahan ini, BPK melakukan diskusi dengan entitas dan konfirmasi ke Kementan.
- Perubahan struktur organisasi mengakibatkan pemindahan fungsi dan SDM-nya, sehingga perlu melakukan pemahaman proses bisnis lebih dalam.
- Operasional pabrik pupuk dan perhitungan HPP pupuk bersubsidi merupakan proses yang kompleks. Sehingga pemeriksaan perlu meningkatkan kompetensi dalam memahami proses bisnis produksi dan perhitungan HPP.

Menurut Novy, jika dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya, maka secara umum tidak akan ada perbedaan. Tim mempedomani petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dari mulai perencanaan pemeriksaan sampai dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab tujuan pemeriksaan.

Sedikit berbeda dengan pemeriksaan kepatuhan lainnya, yaitu pemeriksaan subsidi pupuk merupakan pemeriksaan dukungan terhadap pemeriksaan LKBUN. Dalam hal ini yaitu mendukung pengujian asersi belanja subsidi pupuk.

“Tujuan pemeriksaan adalah menilai kewajaran perhitungan subsidi pupuk. Karenanya, tim pemeriksa akan lebih banyak melakukan verifikasi atas biaya-biaya produksi, distribusi, dan penyaluran pupuk subsidi sebagai komponen terbentuknya HPP pupuk bersubsidi. Tim memverifikasi biaya-biaya, mana yang masuk kategori *allowable cost* dan *nonallowable cost*,” ujar dia.

Metodologi yang Digunakan BPK



Pemeriksaan subsidi pupuk merupakan pemeriksaan dengan jenis tertentu bersifat pemeriksaan kepatuhan. Metodologi pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Perencanaan Pemeriksaan

- Identifikasi pengguna hasil pemeriksaan dan pihak yang bertanggung jawab.
- Penentuan hal pokok, tujuan, dan lingkup pemeriksaan.
- Identifikasi kriteria.
- Pemahaman entitas dan lingkungannya.
- Pemahaman sistem pengendalian intern.
- Penentuan materialitas.
- Penilaian risiko.
- Persetujuan uji pentik.
- Penyusunan strategi dan rencana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

- Pemerolehan dan analisis bukti.
- Pengembangan temuan.
- Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan.

3. Laporan Pemeriksaan

- Penyusunan LHP.
- Tindak lanjut pemeriksaan kepatuhan.

Ketika melakukan pemeriksaan subsidi pupuk, hal yang menjadi temuan BPK yaitu, pertama koreksi *allowable cost* dan *non-allowable cost*. Kedua, kelemahan-kelemahan pengendalian internal, antara lain keterlambatan pengambilan pupuk di gudang dan kelemahan SOP alokasi biaya.

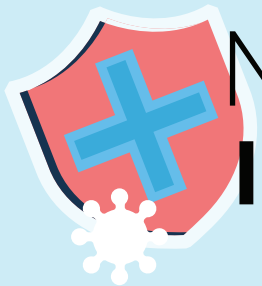
“Masih terdapat temuan berulang, namun keterjadiannya semakin berkurang. Beberapa produsen pupuk menjadikan koreksi perhitungan HPP pupuk bersubsidi sebagai pengurang capaian kinerja,” papar Novy.

Terkait rekomendasi, dia memaparkan, hasil pemantauan tindak lanjut atas 5 anak perusahaan produsen pupuk PT PI (Persero) sampai dengan semester I tahun 2022 menunjukkan bahwa terhadap 723 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dari 770 rekomendasi. Dengan kata lain, telah mencapai 93,89%, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Entitas	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut				Persentase Penyelesaian
				SS	BS	BD	TDD	
1.	PT PKT	58	105	99	5	0	1	94.28%
2.	PT PKG	93	208	200	5	0	3	96.15%
3.	PT PSP	56	120	116	4	0	0	96.66%
4.	PT PK	106	221	196	25	0	0	88.68%
5.	PT PIM	66	116	112	1	0	3	96.55%
	Jumlah	379	770	723	40	0	7	93.89%

Ke depannya, Novy pun berharap kalau BPK dapat memperluas cakupan pemeriksaan selain subsidi pupuk. Alasannya, untuk pemeriksaan tahun 2021 dan sebelumnya, pemeriksaan ditunjukkan untuk menilai kewajaran perhitungan subsidi pupuk. Sementara itu, pemeriksaan subsidi pupuk membutuhkan sumber daya yang cukup besar karena asersi perhitungan subsidi tidak pernah dilakukan verifikasi/pemeriksaan oleh satuan pengawas intern (SPI) atau pihak lainnya.

“Mulai pemeriksaan tahun 2022, BPK mengharapkan tata kelola subsidi pupuk dapat ditingkatkan dengan melibatkan satuan pengawas intern. Apabila tata kelola subsidi pupuk sudah lebih baik, sumber daya yang digunakan untuk memeriksa subsidi pupuk akan lebih sedikit dan BPK dapat memperluas cakupan pemeriksaan,” ungkap dia. ●



Meningkatkan Imunitas Tubuh

Berjemur setiap hari selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi dan/atau setelah jam 3 sore.



Olahraga dengan intensitas ringan/sedang.

Menghindari rokok dan minuman beralkohol.



Batasi berita tentang pandemi.

2

Konseling *online* dengan psikolog atau dokter kesehatan jiwa apabila cemas dan stres mengganggu.



Meditasi dan tidur yang cukup.

3

Interaksi virtual dengan keluarga dan teman.



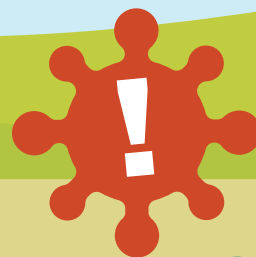
Beraktivitas seperti biasa di ruang isolasi mandiri.

4



Tunda Olahraga Jika :

1. Sesak napas dengan saturasi oksigen <95% saat istirahat.
2. Demam selama 2 hari terakhir.
3. Nyeri dada, nyeri kepala.
4. Batuk terus menerus.





■ Ketua BPK, Isma Yatun

BPK OPTIMISTIS G20 AKAN PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI

Komunike mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam komunitas G20.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan dukungan terhadap Presidensi G20 di Indonesia pada 2022. Bahkan, BPK yakin kalau penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sebagai puncak acara dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 15 November 2022, akan memberikan dampak nyata terhadap Indonesia.

“Selamat atas suksesnya penyelenggaraan KTT G20. BPK optimistis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema G20 ‘Recover Together, Recover Stronger’ yang fokus

terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian,” kata Ketua BPK sebagai Chair of Supreme Audit Institution 20 (SAI20), Isma Yatun.

BPK, kata dia, memberikan dukungan terhadap gelaran ini sejak awal inisiasi kegiatan. Hal ini terbukti dari inisiasi BPK untuk terbentuknya Supreme Audit Institution (SAI) 20 sebagai *engagement group* baru di G20.

Inisiasi BPK ini dilakukan untuk mendukung upaya Pemerintah G20 dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di tingkat global. SAI20 dibentuk sebagai *platform* pertemuan badan pemeriksa atau SAI negara anggota G20.



Selamat atas suksesnya penyelenggaraan KTT G20. BPK optimistis seluruh kegiatan Presidensi G20 Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi.



SAI20 dibentuk dengan beberapa tujuan. Pertama, memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Kedua, membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Dalam praktiknya, SAI20 pun berhasil menghasilkan komunikasi melalui KTT SAI20 yang juga digelar di Bali pada 29-30 Agustus 2022. Komunikasi SAI20 berisi kesepakatan bersama pimpinan badan pemeriksa (SAI) negara anggota G20 yang hadir di KTT tersebut.

Komunikasi juga mengungkapkan peran SAI negara G20 sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia serta mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam komunitas G20. Karenanya, SAI20 diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi nyata dari BPK bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia tahun ini.

Komunikasi SAI20 merupakan 12 pernyataan yang disepakati. Bagian pertama terdiri dari 8 pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai *engagement group* G20.

Bagian kedua adalah dua pernyataan rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan *stakeholders* mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan capaian Agenda SDGs. Kemudian bagian terakhir mengenai keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi publik. ●

Presiden Joko Widodo Sampaikan Poin-Poin Deklarasi KTT G20 Indonesia (Bali Leader's Declaration 2022)



- 1 Perang berdampak negatif terhadap perekonomian global dan pemulihan ekonomi tidak akan tercapai tanpa kedamaian, sehingga perang perlu dihentikan.
- 2 Terbentuknya *pandemic fund* yang hingga saat ini terkumpul 1,5 miliar dolar AS.
- 3 Pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.
- 4 Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dolar AS.
- 5 Komitmen bersama: Setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% dari lautan dunia dilindungi pada tahun 2030.
- 6 Komitmen mengurangi degradasi tanah hingga 50% pada tahun 2040 secara sukarela.

MUHAMMAD RIZAL ASSIDDIQIE, KEPALA BIRO UMUM BERADAPTASI UNTUK MEMBANGUN ORGANISASI



■ Muhammad Rizal Assiddiqie

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadapi tantangan yang serupa dengan institusi lainnya. Yaitu, bagaimana beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan agar terus dapat berbakti kepada negara dengan baik.

Hal ini yang menjadi perhatian Kepala Biro Umum BPK Muhammad Rizal Assiddiqie. Berbakti sejak 1998, Rizal melihat banyak sekali perubahan di BPK. Yang paling nyata adalah pola kerja para pegawai.

Dulu, setiap orang belum semua memiliki laptop untuk menunjang pekerjaan dan setiap hari harus datang ke kantor. Kini, penggunaan laptop sudah menjadi keharusan dan bahkan membantu setiap pegawai untuk bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Tanpa harus melulu datang ke kantor.

Ini antara lain yang melatarbelakangi konsep bekerja *sharing*. Dengan konsep ini, siapapun yang masuk hari itu boleh menempati

meja yang kosong. Jadi, tidak perlu *dedicated* alias menjadi 'hak milik'.

"Konsepnya itu 40 per 60. Kalau ada 100 orang dalam satu satuan kerja, mejanya cukup 40 saja. Karena mereka itu *rolling*, auditor tidak selalu ada di tempat. Sementara barang-barang bisa disimpan di loker," kata dia kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Adaptasi ini, menurutnya, menjadi kunci bagi institusi untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan terus melakukan adaptasi, maka akan ada inovasi baru. Karenanya, Rizal sempat memutuskan untuk melakukan *rolling* pegawai besar-besaran.

"Kalau di-*rolling*, pegawai itu punya ide, ada inovasi baru. Coba kalau kita 10 tahun di tempat yang sama, maka pasti sudah nyaman kita, sudah otomatis. Kita tidak berpikir lagi karena sudah kita kuasai. Dengan *rolling*, kita belajar lagi. Itu namanya membangun organisasi," papar dia.

Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana awal karier Bapak di BPK?

Saya masuk BPK tahun 1998, waktu zaman reformasi. Sebelumnya kerja di kantor akuntan publik, jadi masih *in line* dengan BPK. Ketika '98, saya masih menjadi calon pegawai negeri sipil, itu zaman krisis moneter. Gaji minim dan dibandingkan kerja di swasta berbeda jauh. Saya juga tinggal di Jakarta, jadi terasa berat. Akhirnya minta pindah ke Kepegawaian, tujuannya tentu saja yang dekat dengan daerah kelahiran. Prosesnya cuma sepekan, keluar surat keputusan. Ternyata memang dibutuhkan di sana.

Lalu saya terbang ke Banjarmasin. Dulu masih di bawah Perwakilan Makassar, dipimpin kepala subauditorat. Pada tahun 1998 itu pindah ke sana, di kampung halaman sendiri.

Selama berada di Banjarmasin, saya merasa tidak banyak yang dikerjakan. Sampai-sampai, melihat ada komputer tidak terpakai itu saya betulkan. Karena sebelumnya sudah mengerti penggunaannya, jadi banyak yang minta tolong *ketikin* ke saya. Intinya, di manapun kita, kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita *nggak* mau berubah, akan kesulitan sendiri.

Saya di Banjarmasin sampai 2006. Lalu 2006 akhir kemudian saya jadi kepala subbagian umum di kantor Perwakilan BPK Palangkaraya. Dua tahun itu, selama enam bulan itu bolak-balik Palangkaraya-Banjarmasin. Sempat mengambil pendidikan lalu saya balik lagi pindah ke Banjarmasin, jadi kepala seksi.

Hingga 2010, kepala seksi berubah jadi KTS. Terus pindah ke Kalimantan Timur, jadi KTS juga di sana selama dua tahun. Pas 4a, langsung ditarik jadi kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum. Selanjutnya menjadi kepala bagian rumah tangga-biro umum dari Juli 2017 hingga Juli 2019. Selanjutnya menjadi kepala auditorat pengelolaan pemeriksaan AKN VI. Jadi kepala APP 2 tahun, balik lagi jadi kepala biro umum, kembali mengurus orang-orang.

Waktu itu Bapak meminta pindah ke daerah mungkin ada alasannya?

Karena kualitas hidupnya jauh lebih baik di daerah dibandingkan kota. Masih punya kehidupan, istilahnya, sebelum dan sesudah kerja. Saya sebenarnya memang suka pindah-pindah, biar memiliki wawasan. Jadi kita tahu di BPK itu pekerjaan umum apa, penunjang apa, auditor apa. Jadi tahu semua.

Bapak tercatat sering mengikuti diklat. Ada alasan mengapa demikian?

Orang itu dulu penghasilannya kecil, jadi berpikirnya harus memenuhi perut dulu untuk hidup. Jadi kalau ada tugas pemeriksa, itu akan menjadi sumber pendapatan. Karena saya juga masih sendiri, jadi tidak berpikir seperti yang lain yang sudah berkeluarga dan harus simpan uang.

Selama ikut diklat saya mendapat banyak sekali mentor yang bagus. Saya diajarkan bagaimana harus berkarier ke depan, targetnya jadi apa, berapa lama kita menuju ke sana, apa yang harus dilakukan. Itu sudah saya pikirkan semua. Saya dari 3A ke 3B agak lambat empat tahun tujuh bulan karena ada pergolakan. Apakah mau meneruskan di BPK atau tidak.

Tapi akhirnya melanjutkan. Dari 3D ke 4A kan pengembangan profesinya banyak. Kemudian karena sudah memiliki perencanaan, dari 3D ke 4A hanya ditempuh selama dua tahun.



Selama ikut diklat saya mendapat banyak sekali mentor yang bagus. Saya diajarkan bagaimana harus berkarier ke depan, targetnya jadi apa, berapa lama kita menuju ke sana, apa yang harus dilakukan.

Apa tantangan yang Bapak hadapi ketika di Biro Umum?

Sebelumnya di APP, saya mengkoordinasi wilayah timur. Kalau di daerah itu memang karena alasan anggaran, aset-aset sering terlewat pemeliharannya. Karena memang anggarannya kecil. Rata-rata aset kita di daerah itu sudah jatuh tempo, sudah harus diganti, tapi kita tidak memetakan sebelumnya.

Kapan asset-aset ini harus kita rawat, kita ganti. Nah data ini tidak termonitor dengan baik. Sekarang tiba-tiba semua rusak secara bersamaan. Jadi bingung kita karena anggarannya terbatas.

Inilah tugas kami di Biro Umum, yaitu untuk segera memetakan data aset. Kemudian, karena kita memiliki penambahan pegawai atau CPNS yang banyak, maka juga perlu ada penambahan meja dan kursi. Itu tantangan saya ketika awal masuk sejak Agustus 2022.



Pegawai itu sesuai dengan zamannya. Kita berusaha mendekati teknologi *smart eco office* itu. Supaya mereka tidak ketinggalan serta nyaman dengan lingkungan kerja.



■ Muhammad Rizal Assiddiqie

Walaupun saya tertatih-tatih, namun pemenuhannya sedang kita cari alternatif solusi dan mitigasinya. Apalagi juga ada penambahan provinsi di Papua, yang pasti akan ada tambahan perwakilan.

Program apa saja di Biro Umum yang sudah dan masih dijalankan?

Ke depan kita akan tetap menjalankan konsep *sharing*, tapi dengan beberapa modifikasi. Karena hanya dengan *sharing*, maka siapapun yang masuk hari itu boleh menempati meja yang kosong. Karena memang sedari awal menurut saya, meja tidak perlu *dedicated* alias menjadi 'hak milik'.

Jadi konsepnya itu 40 per 60. Kalau ada 100 orang dalam satu satuan kerja, mejanya cukup 40 saja. Karena mereka itu *rolling*, auditor tidak selalu ada di tempat. Sementara barang-barang bisa disimpan di loker.

Jadi di meja sudah tidak bisa menaruh barang-barang pribadi karena konsepnya *sharing*. Jadi semuanya terakomodasi juga. Apalagi sekarang ke kantor kalau hanya ada perlu saja. Kalau penunjang, ya pasti punya meja. Karena mereka pekerjaannya sehari-hari reguler di kantor.

Bapak ada target juga terkait pengadaan laptop?

Iya, pada tahun ini kita sudah ada pembelian dua kali. Pas awal dan ada tambahan anggaran dari bendahara umum negara, itu juga untuk laptop. Jadi tambahan anggaran itu semua untuk laptop. Biar auditor tidak ada alasan tak bisa kerja. Itu yang kita penuhi kemarin, laptop pegawai dan meja kerja pegawai baru.

Apa yang berbeda bekerja di BPK dulu dengan sekarang?

Kalau dulu pastinya kita terbatas ya. Seperti laptop, itu ya bisa pinjamnya kalau mau pemeriksaan saja. Sementara sekarang sudah melekat di orang atau pribadi. Sebenarnya kantor kita itu sudah lebih dari cukup memfasilitasi kebutuhan pegawai. Bayangkan di perwakilan itu, CNPS dikasih wisma, laptop untuk sarana kerja, penghasilan juga lebih dari cukup. Berbeda dengan beberapa instansi lain.

Tapi, beda generasi itu *kan* beda-beda *treatment*-nya ya. Mengelola orang itu akan lebih susah dari barang. Makanya kami berusaha dari sarana dan prasarana itu menyesuaikan kebutuhan auditor.

Pegawai itu sesuai dengan zamannya. Kita berusaha mendekati teknologi *smart eco office* itu. Supaya mereka tidak ketinggalan serta nyaman dengan lingkungan kerja. Itu yang perlu kita antisipasi. Dengan keterbatasan anggaran, kita coba, salah satunya dengan konsep *sharing* itu. Karena sarana penunjang itu mengikuti jaman. Tantangannya kita harus adaptif dengan lingkungan.

Ada pesan untuk pegawai?

Waktu masuk, saya melakukan *rolling* besar-besaran. Mengapa saya melakukan itu? Karena tujuannya supaya kalau di-*rolling*, pegawai itu punya ide, ada inovasi baru. Coba kalau kita 10 tahun di tempat yang sama, maka pasti sudah nyaman kita, sudah otomatis. Kita tidak berpikir lagi karena sudah kita kuasai. Dengan *rolling*, kita belajar lagi. Itu namanya membangun organisasi.

Kemarin kami bahkan buka kelas untuk *security*. Biar minimal mereka bisa melanjutkan D3 atau S1. Sehingga bila ada pembukaan CPNS, mereka ada kesempatan. Besok kita mau adakan lagi kerja sama dengan lembaga-lembaga yang bisa meningkatkan kompetensi. ●



SEMAKIN MUDAH MENGAKSES INFORMASI MELALUI...

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial



08111907010

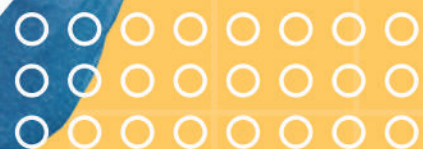


bpk.ri



PPID

EPPID Mobile



Majalah bulanan Warta Pemeriksa
mendapat penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah,
pemberian penghargaan
dilaksanakan pada 25 Maret 2022.



BPK HADIRI INCOSAI BRASIL 2022

Pada kesempatan ini, berbagai dokumen, produk, dan kebijakan INTOSAI disahkan.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri The XXIV INCOSAI Brasil yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada 7-11 November 2022. Pada kesempatan ini, BPK diwakili oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

INCOSAI merupakan pertemuan terbesar di INTOSAI yang diselenggarakan tiap tiga tahun. Pada kesempatan ini, berbagai dokumen, produk, dan kebijakan INTOSAI disahkan. Rangkaian acara INCOSAI XXIII meliputi *opening ceremony*, *plenary sessions* (sidang umum INTOSAI), *governing board meeting ke-76 dan 77*, *goal chairs meeting*, dan berbagai sesi diskusi.

Tema yang diusung dalam INCOSAI tahun ini adalah pertama "The work of SAIs in the context of emergency situations". Kedua, "Global voice, global outcome, far reaching

impact". Pada kesempatan ini, BPK ditunjuk menjadi *rappertur* dalam diskusi tema I dan melaporkannya dalam *plenary session II*.

Sementara itu, dokumen atau produk yang disahkan kali ini adalah "Strategic Plan INTOSAI 2023-2028", "Guidance tentang Enhancing Collaboration between Supreme Audit Institutions and Anti-Corruption Bodies in Preventing and Fighting Corruption: A Practical Guide", "ISSAI 150: Auditor Competence", "GUID 1951: Guidance on the development of pathways for professional development of auditors", "GUID 5250: Audit of Public Debt", "GUID 5330: Audit of Disaster Management", "GUID 5280: Audit of Public Procurement", "GUID 5320: Performance Audit of Privatization", "GUID 5330: Audit of Disaster Management".

INCOSAI Brasil juga menghasilkan Rio Declaration. Isinya menyampaikan suara SAI terkait *responsiveness' SAI, strengthening INTOSAI's global voice, the importance of core principles dan how SAIs can improve their collaboration with stakeholders*.

Selain mengikuti agenda utama INCOSAI, delegasi BPK juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa SAI counterpart dan mengikuti *side events*. Seperti menjadi panelis dalam "IDI launching Equal Futures Audit (EFA)", menjadi panelis dalam "IDI UNDESA handbook on budget credibility", melakukan promosi *output* dari Working Package 4 INTOSAI WGEA terkait *sustainable transport*, menghadiri pertemuan INTOSAI WG on Extractive Industries (WGEI), dan melakukan pertemuan dengan Swedish National Audit Office (SNAO). ●



BPK JADI KETUA PANEL PEMERIKSA EKSTERNAL PBB

Sebanyak 11 SAI anggota Panel yang terdiri dari SAI Chile, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Filipina, Swiss, Rusia, dan Inggris hadir secara langsung pada saat agenda pemilihan berlangsung. Sedangkan SAI Ghana berpartisipasi secara virtual.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatatkan prestasi baru di tingkat internasional. Kali ini, BPK terpilih sebagai ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the specialized agencies and the International Atomic Energy Agency) periode Desember 2022-Desember 2023.

Dengan keterpilihan ini, maka BPK akan menjalankan tugas dan peran yang menjadi tanggung jawab ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB. Termasuk memimpin pertemuan Panel ke-63 (the 63rd Regular Session of the UN Panel of External Auditors) yang akan diselenggarakan pada 20-21 November 2023 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.

Prestasi gemilang ini ditorehkan di pertemuan Panel ke-62 (the 62nd Regular Session of the UN Panel of External Auditors) yang berlangsung pada 28-29 November 2022 di Santiago, Chile. Pada kesempatan itu, BPK dinominasikan sebagai ketua oleh *supreme audit institutions* (SAI) anggota panel yang hadir di acara yang digelar secara hibrida tersebut.

Sebanyak 11 SAI anggota Panel yang terdiri dari SAI Chile, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Filipina, Swiss, Rusia, dan Inggris hadir secara langsung pada saat agenda pemilihan berlangsung. Sedangkan SAI Ghana berpartisipasi secara virtual.



Berdasarkan *rules of procedure* (RoP) Panel Pemeriksa Eksternal PBB, pejabat Panel terdiri dari ketua (*chair*) dan wakil ketua (*vice-chair*). Posisi ini dipilih oleh anggota Panel di setiap akhir sesi reguler untuk menjabat sampai akhir sesi reguler selanjutnya.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam RoP, salah satu posisi dalam kepemimpinan Panel Pemeriksa Eksternal PBB dijabat oleh perwakilan UN Board of Auditor. Tahun ini, SAI Prancis terpilih menjadi wakil ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB.

Mekanisme pemilihan pimpinan Panel Pemeriksa Eksternal PBB berbeda dari keketuaan lainnya. Ketua dan wakil ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB dipilih berdasarkan usulan para anggota dan tidak melalui mekanisme pencalonan diri untuk dipilih.

Posisi sebagai ketua Panel Pemeriksa Eksternal organisasi PBB ini pun semakin menambah prestasi BPK di kancah internasional. Sekaligus membuktikan pengakuan dunia internasional atas kapasitas BPK sebagai lembaga pemeriksa profesional berstandar dunia. ●

Dalam BKN Awards 2022 yang diadakan pada 21 Juli 2022 di Batam, BPK memperoleh tiga penghargaan yaitu:



Peringkat 1

atas capaian dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian.



Peringkat 4

atas capaian dalam penerapan pemanfaatan data-sistem informasi dan CAT.



Implementasi Manajemen ASN Terbaik.

MENGAWAL PENGUATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

BPK sebagai lembaga negara mengambil inisiatif agar TKDN dan P3DN bisa berjalan.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang menginstruksikan kepada seluruh kementerian/ lembaga (K/L) baik di pusat maupun daerah untuk mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan produk dalam negeri (PDN). Meski demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui masih terdapat permasalahan terkait pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang akan mempengaruhi tercapainya penggunaan PDN tersebut.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I BPK Akhsanul Khaq menyampaikan, pihaknya menggelar Workshop Pemenuhan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan AKN I. "Hal ini untuk menyamakan persepsi mengenai P3DN dan juga memperoleh masukan dan pemahaman terkait penggunaan produk dalam negeri dalam rangka memenuhi TKDN," ujarnya pada Jumat (2/12).

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana juga menekankan, P3DN dan TKDN adalah hal penting yang menentukan ketahanan negara ke depan. Dengan adanya risiko gejolak ekonomi pada tahun depan, Indonesia dinilai perlu mengambil inisiatif yang mendukung industri dalam negeri.

Nyoman menekankan, BPK sebagai lembaga negara mengambil inisiatif agar TKDN dan P3DN bisa berjalan. BPK pun akan mengawal kebijakan pemerintah serta menilai proses pelaksanaannya.



■ Nyoman Adhi Suryadnyana



■ Akhsanul Khaq



■ Nila Kumalasari

“TKDN dan P3DN ini akan menjadi *concern* kami dalam melakukan pemeriksaan ke depan,” ujar Nyoman.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian BPK dalam upaya pemenuhan TKDN. Hal itu antara lain proses bisnis, penganggaran, penyiapan SDM dan infrastruktur, dan *mindset* atau keinginan dalam menjalankan program tersebut secara sungguh-sungguh.

Dalam workshop yang digelar di Auditorium BPK secara daring dan luring, Kepala Pusat P3DN Kemenperin Nila Kumalasari memaparkan arahan Presiden Jokowi ketika mendorong upaya P3DN. Presiden Jokowi telah meminta agar anggaran belanja pada 2022 minimal sebesar Rp400 triliun digunakan untuk membeli produk dalam negeri.

Nila mengatakan, arahan itu memiliki dasar yang kuat karena potensi anggaran pemerintah untuk belanja PDN mencapai sekitar Rp1.000 triliun. “Artinya, kewajiban itu hanya 40 persen saja sebetulnya,” ujar Nila.

Agar lebih agresif, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Timnas P3DN meminta untuk hal itu ditingkatkan bahkan menjadi 90 persen. Pada tahun depan, targetnya dibuat menjadi lebih tinggi yakni mencapai 95 persen.

Nila mengatakan, simulasi oleh BPS juga menyebut dana Rp400 triliun tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 persen. Kemenperin juga bekerja sama dengan ekonom untuk melakukan simulasi model CGE dan didapatkan bahwa setiap belanja produk dalam negeri sebesar Rp1 menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional.

“Ini gambaran kenapa harus belanja produk dalam negeri,” ujarnya.

Meski begitu, Nila menekankan, belanja PDN berbeda dengan *local purchase*. Dia menerangkan, *local purchase* artinya, belanja di-

lakukan di dalam negeri tapi produknya impor.

Nila menjelaskan, PDN adalah barang, jasa, atau rancang bangun yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Artinya, investasi atau penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi salah satu syarat PDN.

Kemudian, perusahaan menggunakan tenaga kerja WNI. Semakin banyak WNI yang direkrut maka nilai TKDN akan semakin besar. Penggunaan bahan baku atau komponen juga akan mempengaruhi besarnya nilai TKDN.

“PDN juga harus dibuktikan dengan sertifikat TKDN,” ungkap Nila.

Nila mengakui kemampuan industri dalam negeri di sektor hilir juga masih terbatas. Industri hilir banyak yang membeli produk impor setengah jadi kemudian dirakit atau diolah dan kemudian dibeli oleh konsumen termasuk pemerintah.

“Kami berharap, konsumen bisa mendorong industri hilir untuk membeli dari industri antara atau *intermediate*. Kemudian, industri antara membeli dari industri hulu dan sampai ke bahan baku,” ujarnya.

Dengan hal itu, dia berharap kekayaan bahan baku Indonesia tidak akan langsung diekspor dalam bentuk mentah tapi sudah diolah di dalam negeri. Semakin lengkap alur pasokan barang dari hilir ke hulu yang melibatkan industri dalam negeri maka nilai TKDN produk tersebut semakin tinggi.

“Dengan adanya pabrik, banyak tenaga kerja akan terserap. Sektor ekonomi lain juga akan menggeliat seperti rumah kontrakan, warung makan, dan lain-lain,” ujarnya.

Nila mengajak para pemangku kepentingan untuk mendukung agar uang rakyat yang dikelola negara bisa berputar di dalam negeri dan kembali ke rakyat lagi.



Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP Aris Supriyanto menyampaikan, hingga 14 November 2022, dari total belanja pemerintah senilai Rp1.189 triliun capaian realisasi belanja PDN K/L dan pemda itu sudah sekitar Rp320,5 triliun. Artinya, hal itu sudah setara 41 persen dari total potensi belanja PDN.

"Capaian ini perlu tetap kita jaga dan tingkatkan," ujar Aris.

Aris menyampaikan, dalam menggunakan PDN itu sudah harus dimulai dari perencanaan pengadaan. Sehingga, dalam tahap perencanaan tersebut sudah harus menginventarisasi dan memprioritaskan penggunaan PDN dalam rencana belanja tahun 2023. Pokja dalam menyusun dokumen pemilihan juga perlu mereviu dan memastikan penggunaan PDN dalam spesifikasi teknis. Kemudian diberikan preferensi kepada peserta yang menyediakan PDN paling sedikit 25 persen.

Ini adalah bentuk dukungan khususnya dari pengadaan untuk meningkatkan penggunaan PDN. Dalam katalog elektronik yang dikelola LKPP juga akan ditampilkan produk dengan TKDN paling tinggi pada laman pertama. "Jadi ketika mencari produk atau jasa maka akan tampil produk dengan nilai TKDN yang paling tinggi," ujarnya.

Aris mengatakan, hal ini merupakan bagian dari edukasi terhadap pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pengadaan ketika akan melakukan *purchasing*. Tak hanya itu, LKPP juga terus melaksanakan pembekuan dan penurunan produk dari katalog yang sudah memiliki substitusi produk dalam negeri.

Selain itu, LKPP juga tengah menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik. Salah satu isu yang akan didorong yakni upaya meningkatkan penggunaan PDN dari pengadaan barang dan jasa publik.

"Ini bukan hanya menasar APBN dan APBD tapi juga BUMN, BUMD, dan BLU," ujarnya.

Aris menjelaskan, hampir setiap negara memang memberikan afirmasi terhadap penggunaan PDN. Dia mencontohkan, negara yang mengafirmasi PDN antara lain AS, Malaysia, Australia, dan Korea Selatan. Aris mengatakan, strategi P3DN saat ini bisa diperbaiki dengan membuat fokus pada produk-produk tertentu yang secara nominal besar dan mampu memberikan dampak ekonomi yang tinggi.

"Tahun ini, LKPP sudah mulai menginisiasi mengkonsolidasikan produk laptop dalam negeri untuk kemudian bisa dibeli oleh pemerintah. Kami melihat ada potensi penghematan luar biasa besar sekitar 30 persen dari total anggaran 6,7 triliun," ujar Aris. ●



GERAKAN MENGAJAR UNTUK MENGINSPIRASI

Pada tahun ini, sekitar 4.300 relawan terlibat dalam kegiatan yang tersebar di 37 provinsi dan 5 negara.



Kegiatan Kemenkeu Mengajar telah menjadi sarana bagi para pegawai Kementerian Keuangan untuk membaktikan diri kepada negeri. Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan rutin tahunan dalam bentuk mengajar kepada siswa dan siswa SD, SMP, SMA, sederajat.

Alphiani Nugrahaningsih Purbasari selaku inisiator Kemenkeu Mengajar menjelaskan, kegiatan tersebut bermula sejak 2016. Pada tahun ini, Kemenkeu Mengajar sudah menginjak tahun ketujuh.

Kasubag Hukum Teknologi Informasi Keuangan dan Komunikasi Biro Hukum Kemenkeu itu menjelaskan, kegiatan Kemenkeu Mengajar adalah upaya pegawai Kemenkeu untuk memberikan imbal balik kepada masyarakat dan saling menginspirasi.

Nunu, sapaan akrabnya, mengaku cukup nekat dalam mengajukan kegiatan tersebut karena belum ada contoh kegiatan serupa. Terlebih lagi, kegiatan ini merupakan inisiasi pegawai.

"Alhamdulillah saat itu diterima dan diberikan kesempatan untuk menggelar kegiatan. Dengan hal itu, kami terpacu untuk menyelenggarakan kegiatan dengan baik," ujar Nunu.

Pada penyelenggaraannya, siswa-siswi yang berpartisipasi akan diajarkan bagaimana peran Kemenkeu dalam upaya menjaga ekonomi negeri serta memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu. Selain itu, relawan juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat yang ada di Kemenkeu antara lain keberagaman, toleransi, dan inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari.



Banyak anak-anak yang belum banyak mengetahui pekerjaan di Kemenkeu seperti pegawai pajak, bea cukai, dan lain-lain.



Nunu menyampaikan, selain relawan belajar secara otodidak teknik mengajar siswa, Kemenkeu Mengajar juga memfasilitasi narasumber serta pengembangan kurikulum yang tepat. Hal itu hasil diskusi bersama pakar pendidikan.

Nunu mengatakan, banyak anak-anak yang belum banyak mengetahui pekerjaan di Kemenkeu seperti pegawai pajak, bea cukai, dan lain-lain. Dari kegiatan tersebut, ujarnya, para siswa diberikan pengetahuan mengenai APBN dengan cara yang menyenangkan dan mudah dicerna.

Kasi Kerja Sama Bilateral II Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Muchsin Husein menyampaikan, kegiatan Kemenkeu Mengajar telah memberikan inspirasi baik kepada para siswa maupun para relawan yang terlibat. Husein mengatakan, salah satu yang menarik adalah semangat kerelawanan dari para pegawai maupun pimpinan Kemenkeu yang terlibat.

Kegiatan Kemenkeu Mengajar melibatkan pegawai Kemenkeu dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengusung semangat kesukarelaan sehingga panitia tidak memungut biaya pada sekolah. Pegawai yang terlibat pun tidak mendapatkan pembayaran sehingga tidak membebani APBN.

Selain itu, inspirasi juga justru datang dari para siswa. Dari pengalaman selama mengajar, Husein merasakan adanya bentuk kebahagiaan tanpa syarat dari anak-anak.

"Misalnya, mereka melihat kami karena kami dari Bea Cukai dan mengenakan seragam mereka bersorak menyambut untuk bermain dan belajar bersama," ujarnya.

Inspirasi juga datang berkat kehadiran pimpinan Kemenkeu dalam kegiatan tersebut. Husein mengisahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut serta mengajar anak-anak SD dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar. Menurut Husein, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu sangat paham cara menarik perhatian siswa.

"Kalau biasanya kami melihat Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) sangat serius di ruang rapat, beliau sangat terlihat sosok guru dan keibuannya ketika mengajar," ungkapnya.

Husein yang juga merupakan Koordinator Utama Kemenkeu Mengajar 6 mengatakan, dukungan pimpinan membuat kegiatan tersebut bisa terus berkembang. Saat ini, seluruh pejabat eselon I Kemenkeu termasuk menteri dan wakil menteri sudah pernah terlibat dalam Kemenkeu Mengajar.

Selain mengenalkan Kemenkeu kepada para siswa, Kemenkeu Mengajar juga memberikan penjelasan mengenai fenomena pandemi dan bagaimana Kemenkeu terlibat dalam penanganannya. Dalam Kemenkeu Mengajar 7 yang digelar pada tahun ini, panitia juga menyiapkan modul untuk setiap jenjang pendidikan. Hal itu diharapkan dapat menjadi panduan sehingga program pengajaran bisa seragam di seluruh Indonesia bahkan hingga ke luar negeri.

Pelaksana KPU BC Soekarno Hatta Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Arnold Binsar Napitupulu sekaligus Wakil Koordinator Utama Kemenkeu Mengajar 7 mengatakan, pada tahun ini sekitar 4.300 relawan terlibat dalam kegiatan yang tersebar di 37 provinsi dan 5 negara. Siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan ini mencapai 53 ribu orang.

"Ini capaian terbesar kami dan sesungguhnya di luar ekspektasi kami," ujarnya.

Arnold mengatakan, semangat Kemenkeu Mengajar sudah semakin dirasakan keluarga Kemenkeu di berbagai lokasi. Penyelenggaraan di luar negeri pada tahun ini pun bisa diselenggarakan secara luring. Ia mencontohkan, kegiatan Kemenkeu Mengajar di Tokyo pada tahun ini digelar di sekolah Indonesia luar negeri dengan dukungan atase Kemenkeu.



Menularkan Kemenkeu Mengajar

Arnold mengaku bisa merasakan para siswa peserta Kemenkeu Mengajar sangat terinspirasi dari kegiatan tersebut. Salah satunya terlihat dari tugas menulis yang diberikan kepada para siswa.

"Untuk jenjang SD, kami minta mereka menulis cita-cita, untuk jenjang SMP kami minta membuat surat untuk menkeu, dan untuk jenjang SMA kami minta mereka menulis jika aku menjadi menkeu apa yang akan kulakukan untuk Indonesia," ujarnya.

Dari tulisan-tulisan yang terkumpul, ujar Arnold, bisa terlihat para siswa terinspirasi dengan kedatangan para relawan. Arnold mengatakan, ada siswa yang menulis, akan membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya untuk menangani orang sakit jika menjadi menkeu kelak. Ada juga yang akan menggunakan pajak untuk membantu orang miskin.

"Dari sana terlihat mereka punya harapan. Kami juga berharap dari literasi mereka itu bisa menular kepada lingkungan mereka supaya semakin banyak masyarakat yang memahami tugas Kemenkeu," ujarnya.

Nunu mengatakan, penyelenggaraan Kemenkeu Mengajar pada tahun depan masih dalam tahap perencanaan. Meski begitu, dia berharap kegiatan itu bisa terus berkembang.

Tak hanya itu, Nunu berharap semangat kerelawanan dari kegiatan ini bisa menular ke kementerian/lembaga lainnya.

"Tidak harus dalam bentuk mengajar tapi pada intinya kita sebagai abdi negara perlu mengembalikan apa yang sudah diterima kemudian kita kembalikan kepada masyarakat," ujar Nunu. ●

JAGA DATA DIGITAL DENGAN *SECURITY AWARENESS* DAN *ZERO TRUST SECURITY*

Security awareness seluruh pegawai BPK juga memiliki peran yang signifikan untuk menjamin keamanan informasi.



■ Pranoto

S seiring Akselerasi Transformasi di berbagai bidang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan beragam upaya untuk mengoptimalkan sumber daya, termasuk teknologi informasi (TI). Apalagi saat ini, proses pemeriksaan yang menjadi tugas utama BPK telah didukung dengan sistem informasi yang semakin terintegrasi.

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto, mengatakan saat ini, proses bisnis utama BPK, yaitu pemeriksaan, semakin terintegrasi bukan hanya antarsistem informasi internal BPK. Akan tetapi, juga dengan entitas pemeriksaan, baik dari tahap pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut.

Pemanfaatan teknologi informasi ini pun secara otomatis berdampak terhadap data digital yang semakin banyak dan lengkap di BPK. Baik data internal maupun eksternal. Data yang dikelola sudah semakin besar, kompleks, dan saling tersambung antarsatuan kerja. Dengan pengelolaan yang dilakukan menggunakan infrastruktur TI, maka proses penyimpanan, pengolahan, dan pengiriman berlangsung dengan cepat dan selama 24 jam.

Akan tetapi, di balik beragam kelebihan dalam pemanfaatan teknologi informasi, Pranoto

menyebut, telah terjadi perubahan tren serangan di dunia siber. Saat ini, para aktor kejahatan menggunakan modus baru dengan usaha pencurian data dan ransomware dengan pegawai internal sebagai serangan utamanya serta menggunakan e-mail phishing.

Dengan kondisi ini, BPK tentunya semakin banyak menghadapi tantangan keamanan data. Karenanya, upaya-upaya optimal terus dilaksanakan untuk menjamin keamanan data BPK dalam menghadapi tren serangan siber yang terus berubah dengan cepat dan dinamis.

“Di satu sisi kita asyik meningkatkan dan memajukan teknologi digital. Di sisi lain serangan siber hadir dengan modus-modus baru, seperti *phishing* atau *ransomware*, yang masuk lewat para pegawai BPK,” ungkap Pranoto kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Oleh karena itu, ucap dia, Biro TI telah melakukan beberapa upaya optimal untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis BPK. Misalnya saja menyusun dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Kemudian menerapkan standardisasi perangkat pengguna untuk memudahkan pengelolaan perangkat dan keamanannya.

Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan *big data analytics* untuk keamanan informasi dan penerapan *zero trust security*. BPK juga melakukan investasi infrastruktur keamanan serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Namun demikian, upaya-upaya pengamanan informasi masih harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tujuannya, untuk menutup *gap* keamanan informasi yang ada dan menghadapi tren serangan siber. “Prinsip Biro TI adalah tidak boleh merasa telah aman dan harus terus waspada dalam menghadapi serangan siber,” ungkap dia.

Oleh karena itu, lanjut Pranoto, upaya pengamanan informasi merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti. Dari sisi pegawai



“**Pengamanan di dunia digital itu sifatnya berkelanjutan, kalau sampai berhenti atau merasa puas, itu malah bahaya.**”

juga terus-menerus diperbaiki dengan menekankan dan meningkatkan *security awareness*. “Pengamanan di dunia digital itu sifatnya berkelanjutan, kalau sampai berhenti atau merasa puas, itu malah bahaya,” ucap dia.

Mitigasi Keamanan Data

Upaya optimal Biro TI pun diwujudkan lewat beberapa langkah. Yang paling utama adalah pembentukan BPK Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Fungsi dari CSIRT ini adalah untuk mengoordinasikan dan mengo-laborasikan penanggulangan serta pemulihan terhadap insiden keamanan siber secara cepat serta membangun kapasitas sumber daya dalam keamanan siber.

“SDM CSIRT ini tidak hanya berasal dari tim Biro TI, namun juga berasal dari Ditama Binbangkum, Biro Umum, Biro Humas, dan lain sebagainya,” ucap dia.

Langkah berikutnya adalah kerja sama de-

ngan BSSN dalam masalah deteksi ancaman, *vulnerability security assesment*, dan penanganan insiden. Selain itu adalah penerapan sertifikasi ISO 27001 terkait operasional *data center* untuk memastikan keamanan. Langkah selanjutnya adalah peningkatan *security awareness* pegawai yang diberikan secara berkala.

Saat ini, memang BPK masih dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Hanya saja dia menyampaikan standar ISO itu sudah berupaya diterapkan oleh Biro TI dalam operasional *data center*.

“Bagi BPK, khususnya Biro TI, memandang isu pengamanan data menggunakan prinsip *confidentiality, integrity, dan availability* (CIA) yang harus terjamin di data tersebut. Untuk mencapainya, perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif melalui pilar *people-process-technology* (PPT),” ucap dia.

Prinsip *confidentiality, integrity, dan availability* (CIA), menurut dia juga amat penting karena usaha penerobosan selalu ada. Bahkan, hampir tiap detik selama 24 jam, baik dari internet maupun intranet.

Menurut Pranoto, usaha penerobosan lewat internet mempunyai tren perubahan yang cepat. Bahkan, selalu saling mengejar dengan pengamanan yang dilakukan oleh BPK. Sedangkan insiden-insiden yang terjadi di intranet, perubahan trennya terbilang lebih lambat.

Kalaupun terjadi kebocoran, ucap Pranoto, tim CSIRT akan melakukan analisis untuk mengkonfirmasi keabsahan adanya indikasi kebocoran data atau penerobosan keamanan. Jika memang valid, akan dilanjutkan dengan investigasi dan mitigasi untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar.

Proses analisis indikasi kebocoran data atau penerobosan keamanan yang dijalankan mengacu kepada kebijakan-kebijakan BSSN sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber. Selain itu, Biro TI juga menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur pengamanan data menggunakan panduan yang sudah ditetapkan.

Lewat CSIRT, kata dia, Biro TI berupaya terus mendorong keamanan data lewat sumber daya manusia (*people*). Selain proses bisnis dan teknologi, pegawai memang menjadi kunci untuk menjamin keamanan informasi.

People di sini bisa dilihat dari sisi personel bidang TI dan pengguna TI itu sendiri. Dari sisi personel bidang TI, masih diperlukan tambahan tenaga karena tim penanganan insiden dan keamanan data masih tergabung dengan unit lain yang tentunya mempunyai tanggung jawab lain. Padahal untuk pengamanan dibutuhkan SDM yang terlatih dan mempunyai waktu yang didekasikan secara khusus. Terkait personel pengguna TI, *security awareness* dari seluruh pengguna TI BPK juga memiliki peran yang signifikan untuk menjamin keamanan informasi.

Pranoto juga mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan pengguna dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu dipertimbangkan dengan tepat agar nyaman dan aman. Hal ini tentunya membutuhkan kontrol. Namun dibutuhkan pengukuran terlebih dahulu terhadap kenyamanan penggunaan dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi tersebut. Setelah itu, baru bisa dipilih kontrol yang sesuai dan dilaksanakan dengan dukungan penuh seluruh jajaran.

Karena tugas dan kewenangannya, dia pun berharap BPK dapat menjadi pusat data keuangan negara yang sangat lengkap. Karena tren perkembangan data akan terus berlanjut pada masa yang akan datang. Sementara serangan siber juga terus berubah-ubah.

Karenanya, akan saling berkejaran antara upaya pengamanan informasi BPK dan serangan siber. Oleh karena itu, akselerasi transformasi digital dengan kunci *people* diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, BPK da-



UPAYA BPK DALAM MEMPERKUAT PENGAMANAN DATA

- Efektifitas kebijakan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) beserta kontrolnya.
- Penguatan SDM tim BPK-CSIRT.
- Penerapan zero trust security secara efektif.
- Penggunaan secara bertahap *multi-factor authentication* untuk menghadapi serangan *password* yang sering dilakukan oleh aktor kejahatan.
- Pengembangan dan pemanfaatan *big data analytics* untuk mendukung keamanan informasi BPK.
- Pengembangan infrastruktur keamanan informasi berkesinambungan.

pat *agile* dan *resilient* dalam menanggapi perubahan tren serangan keamanan informasi pada masa yang akan datang.

“Pengamanan data adalah tanggung jawab kita bersama, untuk selalu dijaga dari risiko kerusakan atau kebocoran data. Selalu ikuti *security awareness* yang kami lakukan secara berkala. Kemudian sebarkan *awareness* ke dalam unit kerja Anda. Selalu masukkan aspek keamanan ke dalam setiap pekerjaan sehari-hari dan dalam setiap membuat prosedur kerja,” ucap dia. ●

Syarat Isolasi Mandiri (Isoman)

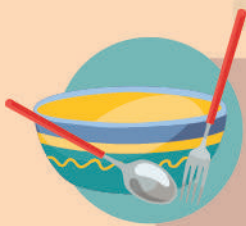
Jika pasien Covid-19:

Tidak bergejala atau
bergejala ringan.

Dinyatakan oleh
tenaga medis dapat
melakukan isoman.

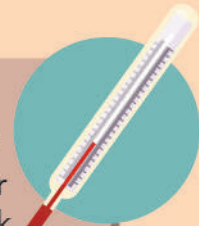


Persiapan isoman



Siapkan kamar, alat makan, dan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid-19.

Siapkan termometer dan oksimeter (*pulse oxymetry*) untuk memantau suhu, saturasi oksigen serta frekuensi nadi.



Siapkan obat-obatan dan vitamin untuk menunjang daya tahan tubuh.



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
meraih penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak Tahun 2021

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.



WAKIL KETUA MINTA BADIKLAT SELARAS DENGAN DNA BPK

Badiklat merupakan bagian dari kelengkapan transformasi digital di BPK.



■ Agus Joko Pramono



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap perlu untuk menjalankan transformasi digital yang lengkap. Untuk itu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) disebut perlu menata proses bisnis dan menyelaraskan dengan Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK.

Hal ini mengingat Badiklat merupakan bagian dari kelengkapan transformasi digital di BPK. Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, mengatakan perubahan di Badiklat yang selaras dengan DNA BPK memungkinkan perubahan dan pengembangan secara masif dan bersama-sama.

"Jangan sampai Badiklat berusaha berkembang sendirian, tapi tidak *inline* dengan perkembangan proses bisnis dengan satuan kerja (satker) lain di BPK," ujar Wakil Ketua BPK dalam Rapat Koordinasi Badiklat PKN, di Jakarta, Jumat (18/11).

Dalam tataran teknis, dia menambahkan, sis-

tem teknologi kediklatan juga harus dibangun secara integratif. Hal ini agar aplikasi kediklatan saling berhubungan dengan aplikasi-aplikasi lain di BPK. Dengan begitu dapat memudahkan pengguna dan pengelolaan datanya.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua BPK juga mendorong agar Badiklat PKN membuat kajian-kajian teoritis bagaimana menjalankan lembaga kediklatan. Sebab, Badiklat PKN merupakan kelengkapan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan strategi kediklatan memang didasarkan pada praktik-praktik terbaik yang relevan dengan kondisi saat ini," ungkapnya kepada seluruh pegawai Badiklat PKN.

Pengarahan ini merupakan agenda utama dari kegiatan rakor Badiklat PKN yang diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada Jumat-Sabtu (18-19 November 2022). Kegiatan yang diikuti oleh 232 orang pegawai ini mengambil tema "BPK CorpU untuk Pembelajaran yang Lebih Maju".

Sementara itu, Kepala Badiklat PKN, Suwarni Dyah Setyaningsih, mengatakan rakor kali ini merupakan momen untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan BPK CorpU. Mulai dari Direktorat Litbang, Biro SDM, hingga Biro TI. Termasuk juga menyempurnakan proses bisnis Badiklat PKN dengan peningkatan dukungan kelembagaan yang ada. ●



ANGGOTA III BPK SAMPAIKAN KULIAH UMUM DI UPN "VETERAN" JAKARTA

Pada kesempatan tersebut, Achsanul juga memaparkan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah serta jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengisi kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta pada Selasa (8/11). Di kuliah umum yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN "Veteran" Jakarta itu Achsanul menyampaikan materi mengenai "Akuntansi Forensik dan Investigasi".

Dalam paparannya, dia menjelaskan bahwa penyimpangan dalam konteks ilmu audit adalah kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Dua hal ini dianggap mirip dengan satu perbedaan mendasar, yaitu unsur kesengajaan.

Achsanul pun memaparkan mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigasi. Menurut dia, LHP investigasi merupakan dokumen tertulis yang berisi simpulan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK.



Tujuan pelaporan pemeriksaan investigatif ini, tambahnya, adalah menyampaikan temuan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana (PITP) kepada instansi berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. “Secara metodologi, pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan yang dirancang untuk menemukan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana,” ujar Achsanul.

Dia mencontohkan, penyimpangan yang berindikasi tindak pidana antara lain menyuap pejabat negara. Kemudian menyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, menggelapkan aset/barang milik negara (BMN), dan melakukan kecurangan atas laporan keuangan.

“Seluruh informasi dan bukti relevan yang diperoleh pemeriksa, dirangkai dan diungkapkan menjadi sebuah laporan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh instansi berwenang,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Achsanul juga memaparkan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah serta jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Disebutkan, terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Mulai dari pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, pemeriksaan kinerja ditujukan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Sedangkan PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT ini dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

“Pemeriksaan ini adalah spesifik, inilah yang sering menghasilkan temuan kecurangan (*fraud*) dan dilakukan pemeriksaan investigasi (*forensic audit*) ke depannya,” ungkap dia. ●





BPK menerima Penghargaan **Bronze Winner** untuk **Kategori Kanal Digital Subkategori Aplikasi** pada ajang **Anugerah Humas Indonesia 2022** yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Malang.



SPIRITUALITAS STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA



■ OLEH **M. WILDAN SAMANI**
ANALIS KEPEGAWAIAN
MADYA PADA BIRO SDM
BPK RI

Spiritualitas standar kompetensi adalah penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Penguatan integritas pemeriksa menjadi tantangan bagi BPK. Perlukah memasukkan aspek spiritual dalam standar kompetensi pemeriksa? Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidang kerja yang dipersyaratkan. Spiritualitas adalah prinsip hidup seseorang untuk menemukan makna dan tujuan hidup serta hubungan dan rasa keterikatan dengan sesuatu yang misterius, maha tinggi, Tuhan, atau sesuatu yang universal (Burkhardt, dalam McEwen 2004). Jadi, spiritualitas standar kompetensi adalah penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

A. Standar Kompetensi Jabatan ASN

Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar Kompetensi ASN antara lain meliputi kompetensi jabatan yang terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
3. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

BPK RI sebagai Lembaga Negara pengguna ASN, dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit diharuskan menyusun Standar Kompetensi ASN. Tahun 2011 BPK memiliki Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK yang ditetapkan dalam Keputusan Sekjen BPK No. 335/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 27 Juli 2011. Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk perencanaan, perekrutan, pengangkatan, penempatan, *assessment*, penyusunan kurikulum/program diklat, pengembangan karir pemeriksa, dan pemberhentian pemeriksa, serta sebagai kriteria dalam pelaksanaan pengukuran kompetensi teknis pemeriksa. Sepuluh tahun kemudian, BPK telah memiliki Kamus Kompetensi Teknis berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/265/M.SM.03.00/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Persetujuan tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP).



Jika dilakukan spiritualitas dalam standar kompetensi maka akan ada penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan para pegawai pelaksana BPK akan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Kamus ini disusun untuk memenuhi Standar Kompetensi Jabatan ASN sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Untuk Kamus Kompetensi Teknis Non JFP masih dalam proses validasi Menteri PAN dan RB. Sedangkan Kamus Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural diatur dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017.

B. Integritas Gerbong Spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP

Apakah mungkin dilakukan spiritualitas standar kompetensi? Penulis berpendapat spiritualitas standar kompetensi dapat dilakukan. Untuk standar kompetensi teknis dapat disusun dan ditetapkan oleh PPK Kementerian/Lembaga setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Sedangkan standar kompetensi manajerial dan sosial kultural disusun dan ditetapkan secara nasional oleh Menteri.

1. Untuk bisa menjadi pelaksana kebijakan pemerintah yang baik maka pegawai pelaksana BPK harus memiliki kompetensi teknis, dalam hal ini dapat dilakukan spiritualitas standar kompetensi terkait kecerdasan intelektual (teknis).
2. Untuk bisa menjadi pelayan publik yang baik maka pegawai pelaksana BPK harus meningkatkan kompetensi manajerial, dalam hal ini dapat dilakukan spiritualitas standar kompetensi terkait kecerdasan emosional (manajerial).
3. Untuk menjadi perekat bangsa maka pegawai pelaksana BPK harus semakin cerdas dalam kompetensi sosial kultural, dalam hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kecerdasan spiritual (sosial kultural).

Jika dilakukan spiritualitas dalam standar kompetensi maka akan ada penyatuan antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan hidup, dan para pegawai pelaksana BPK akan melakukannya semata-mata karena Tuhan.

Dalam Prinsip-prinsip Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017) pada pembahasan tentang Kode Etik disebutkan bahwa independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara. Dalam hal ini, nilai integritas menjadi mahkota bagi nilai independensi dan profesionalisme (Gunarwanto, BDY Podcast, 2022). Atas dasar semangat melaksanakan nilai integritas demi kepentingan negara dan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK maka diperlukan spiritualitas kompetensi teknis JFP. Itulah alasan sederhana mengapa penulis berpendapat spiritualitas standar kompetensi dapat dilakukan.

Integritas sesuai SPKN merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. Integritas menurut PermenPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN adalah konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Dari dua definisi integritas tersebut yang menggarisbawahi perlunya bersifat jujur maka dapat disimpulkan bahwa integritas identik dengan kejujuran. KBBI juga mengartikan integritas adalah kejujuran. Ditilik dari definisi integritas, maka jika integritas tidak dilaksanakan akan menghilangkan marwah kehormatan BPK dalam mengemban visi menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola Keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Integritas selain menjadi mahkota bagi nilai-nilai dasar BPK yang lain yaitu independensi dan profesionalisme juga menjadi gerbong spiritualitas standar kompetensi teknis JFP.

C. Contoh Spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP

Nama Kompetensi: Implementasi Nilai Integritas Untuk Jujur Tidak Menerima Suap Sesuai Norma Agama.

Kode Kompetensi : KT-JFP-(xx)

Definisi : Kemampuan menghafal, memahami, melaksanakan, mengarahkan, menjadi *role model*, mengevaluasi dan menjamin proses pemeriksaan telah sesuai nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

DESKRIPSI LEVEL 1

Mampu menghafal, memahami dan melaksanakan nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 1.1 yaitu menghafal teks larangan menerima suap dan memahami maknanya sesuai norma agama masing-masing.

Bagi pemeluk agama Islam

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Islam terkait suap yaitu:

- Firman Allah SWT terkait *risywah* (suap), Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*"
- Sabda Rasulullah SAW terkait *risywah* (suap), dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah bersabda, "*Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap.*" [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313]; dan dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: "*Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap.*" [HR. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830; Abu Dawud no. 3582; Tirmidzi no. 1337; Ibnu Hibban no. 5077].

Bagi pemeluk agama Kristen

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Alkitab terkait suap yaitu:

- Kitab Ulangan 16:19, "*Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan*

- janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar.*"
- Kitab Keluaran 23:8, "*Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.*"
 - Kitab Amsal 15:27, "*Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup.*"
 - Kitab Pengkhotbah 7:7, "*Sungguh, pemerasan membodohkan orang ber hikmat, dan uang suap merusakkan hati.*"

Bagi pemeluk agama Buddha

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Ajaran Sang Buddha terkait suap yaitu:

Majjhima Nikaya 117, "*Mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu (kuhana), membual (lapana), memeras (nemittakata), menggelapkan (nippesikata), merampok agar mendapat hasil yang banyak (labha).*"

Bagi pemeluk agama Hindu

Mengetahui, hafal dan taat menjalankan Perintah Kitab Suci Veda terkait suap yaitu:

- Manavadharmasastra IV.170, "*Adharmiko naro yo hi, yasya capy anrtam dhanam, himsa ratasca yo nityam, nehasau sukham edhate.*" Terjemahan: Seseorang yang tidak menjalankan dharma dan memperoleh kekayaan dengan kecurangan yang selalu merugikan dan menyakiti pihak lain, maka mereka tidak akan pernah berbahagia di dunia ini.
- Sarasamuccaya Sloka 11, "*Urddvabahurviraumyesa, naca kascicchrnoti me, dharmarthasca kamacca, sa kimartham na sevyate.*" Terjemahan: Itulah sebabnya Aku tak henti-hentinya berseru memperingatkan dalam mencari harta kekayaan (dan) kesenangan (kama) haruslah berlandaskan pada Dharma (kebenaran, kejujuran). Demikian kataKu (namun) jarang yang mendengarkan; memang tidak mudah berbuat Dharma (Gde Pudja, tt).
- Dharmasastra 19, "*Dravyānām apyanadānām Āpadapi yatheccchayā Aparigraha ityuktas tamprsytnena pālayet.*" Terjemahan: Menolak pemberian yang tidak sah (suap) walaupun dalam keadaan miskin, karena niat, (sikap) itu disebut Aparigraha (tidak rakus) ini harus dipertahankan dengan penuh perhatian (Punyatmaja, 1995: 31).



Jika spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP dapat dilaksanakan maka Trilogi Pembangunan Integritas dapat dibangun secara bersama.

Indikator Perilaku 1.2 yaitu melaksanakan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 1.3 yaitu melaksanakan setiap tahapan proses pemeriksaan secara jujur yaitu berkata benar dan dapat dipercaya, menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan.

DESKRIPSI LEVEL 2

Mampu mengarahkan implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 2.1 yaitu mengarahkan tim untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 2.2 yaitu mengarahkan tim untuk melaksanakan setiap tahapan proses pemeriksaan secara jujur yaitu berkata benar dan dapat dipercaya, menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan.

DESKRIPSI LEVEL 3

Mampu mengevaluasi implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 3.1 yaitu mengantisipasi risiko dalam proses perencanaan pemeriksaan agar sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 3.2 yaitu mengevaluasi proses pelaksanaan dan pelaporan agar sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

DESKRIPSI LEVEL 4

Mampu menjadi *role model* implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 4.1 yaitu menjadi *role model* bagi tim untuk tidak menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing baik dari auditee, rekanan, dan pihak lain.

Indikator Perilaku 4.2 yaitu membuat Surat Pernyataan Integritas yang ditandatangani di atas meterai bahwa apabila terindikasi menerima suap maka akan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pemeriksa dan/atau Jabatan Struktural, selanjutnya akan menjalani proses kode etik dan proses pidana.

DESKRIPSI LEVEL 5

Mampu menjamin proses implementasi nilai integritas untuk jujur tidak menerima suap sesuai norma agama.

Indikator Perilaku 5.1 yaitu menjamin proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing.

Indikator Perilaku 5.2 yaitu menggali dan mengembangkan norma agama tentang larangan menerima suap sesuai ajaran agama masing-masing, dan menyusunnya pada perangkat lunak pemeriksaan.

Jika spiritualitas Standar Kompetensi Teknis JFP dapat dilaksanakan maka Trilogi Pembangunan Integritas dapat dibangun secara bersama. Pembangunan sistem integritas melalui perangkat lunak, pembangunan budaya integritas dalam bentuk perilaku jujur tidak menerima suap sesuai norma agama, dan penegakan hukuman bagi yang menerima suap secara kode etik dan proses pidana. Semoga. ●

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai **PPID BPK Mobile**

Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!





1

1-2
Ketua BPK Isma Yatun menghadiri Tasyakuran CPNS 2022 bersama Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di auditorium BPK, 22 November 2022.



2



3



4



5



6

3-6
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menghadiri acara yang diselenggarakan oleh komunitas BPK Archery, 26 November 2022.



7
Entry meeting Kementerian Perhubungan dihadiri Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, 22 November 2022.



8
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri entry meeting interim Kejagung, 24 November 2022.



9-10
Entry meeting interim di Dirjen Pajak dihadiri Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing, 25 November 2022.



11
Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menghadiri acarapisah sambut AKN III, 3 November 2022.



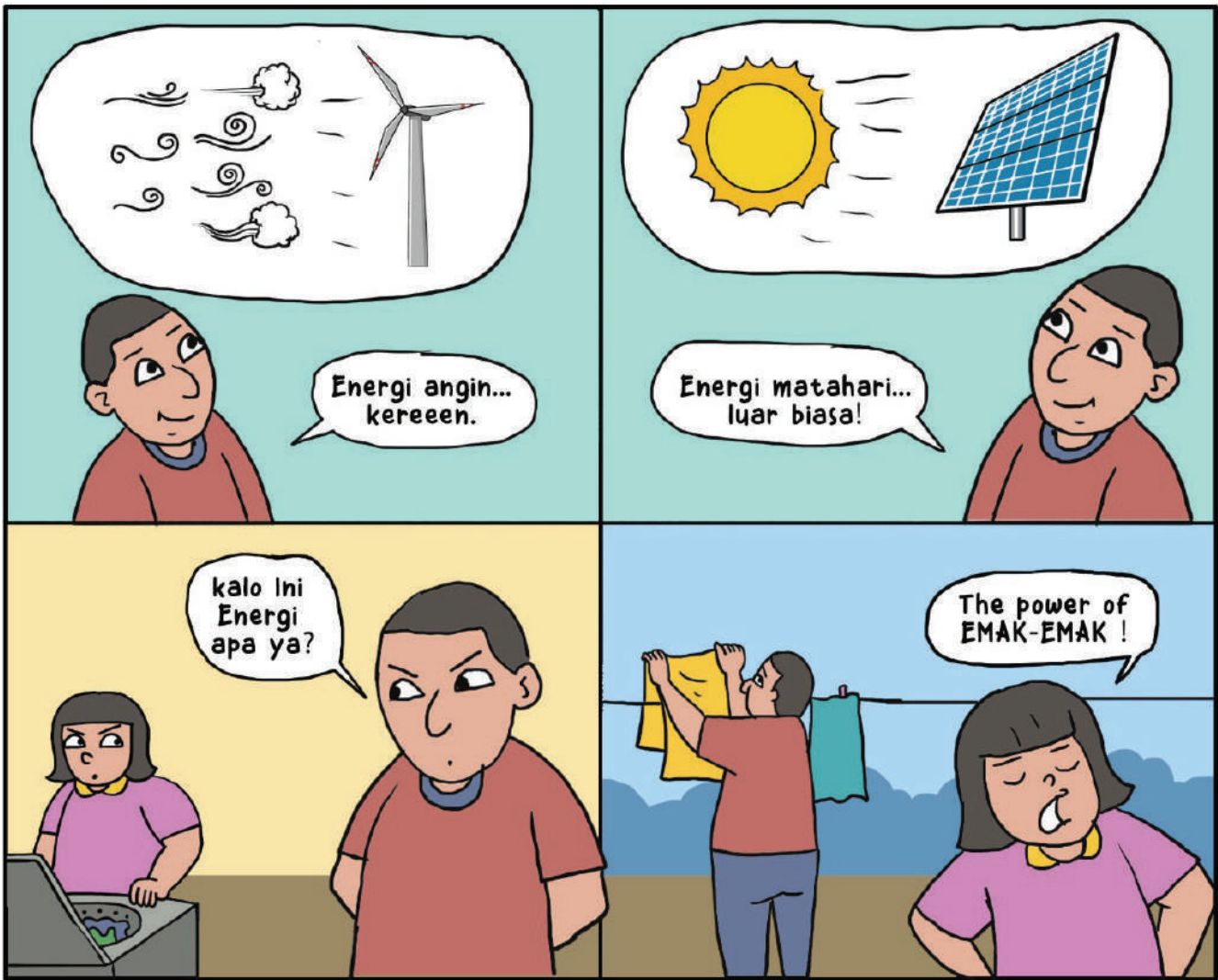
12
Pisah sambut AKN IV dihadiri oleh Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh, 3 November 2022.

13
Rapat Konsultasi Komite IV DPD RI dengan BPK RI dihadiri Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 15 November 2022.

14-15
Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit dan Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilangang menghadiri Rakornis AKN V-VI yang diselenggarakan di Sheraton Bandung, 28-29 November 2022.



16-17
Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto turut serta dalam Friendly Match BPK RI dengan BSI, 17 November 2022.



Kuis

Aplikasi apa yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan disediakan bagi individu atau badan yang mengetahui informasi terkait perbuatan terindikasi melawan hukum?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



G20

INDONESIA

2022 RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER





HARI PAHLAWAN 2022

PAHLAWANKU TELADANKU



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)